

STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Oleh :

Teguh Budi Prasetya¹, Arif Kurniar Rakhman², Niken Widyastuti³

¹Akbidyo

²Universitas Proklamasi 45

³Unjaya

E-mail : teguhbudiprasetya@gmail.com

ABSTRAK

Bagi sektor pertanian, irigasi adalah infrastruktur penunjang yang amat penting, sebab ketersediaan air pertanian amat menentukan produktivitas hasil panen. Namun membebankan pengelolaan irigasi pertanian kepada pemerintah jelas tidak mungkin, sebab dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi tentu kemampuan pemerintah amatlah tidak memadai. Oleh karena itu, melalui Undang Undang no 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air pemerintah berusaha membagi peran dengan partisipasi masyarakat. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah wadah yang disediakan bagi petani untuk ikut berperan aktif dalam pengelolaan irigasi, khususnya irigasi tersier. Namun dalam pelaksanaannya, P3A sendiri masih banyak menemui masalah, baik yang menyangkut aspek manajemen, organisasi, sustainabilitas maupun kemampuan teknis pengelolaan irigasinya. Ini berakibat masih rendahnya kinerja P3A. Oleh karena itu penguatan kelembagaan P3A harus terus dilakukan. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi penguatan kelembagaan P3A yang baik untuk mendukung optimalisasi peran P3A dalam pengelolaan irigasi pertanian.

Kata Kunci : Kelembagaan, Strategi, Irigasi

A. PENDAHULUAN

Bagi pertanian dengan kondisi khusus seperti Gunungkidul, irigasi dan penyediaan air menjadi titik krusial yang menentukan keberhasilan usaha tani. Kemampuan masyarakat dan pemerintah menyediakan air pertanian menjadi begitu penting karena hampir sepanjang tahun pertanian di sana amat bergantung dari air irigasi. Dalam situasi seperti itu maka pengelolaan irigasi baik primer, sekunder maupun tersier harus berjalan secara efektif.

Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sistem irigasi di tingkat usahatani telah ditetapkan dalam 2 (dua) landasan hukum yaitu UU No. 7 Tahun

2004 tentang Sumber Daya Air (Kementrian ESDM, 2020) dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Kementrian Keuangan, 2021). Pada kedua landasan hukum tersebut, ditekankan bahwa “pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air”. Artinya, segala tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat tersier menjadi tanggung jawab lembaga Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Untuk mampu menjadi mitra pemerintah dan mengemban tugas sepenting itu, P3A sebagai bentuk partisipasi petani dalam penyediaan saluran irigasi haruslah dalam kondisi sehat

secara kelembagaan. Sebab dari kelembagaan yang sehat dapat diharapkan kinerja yang baik pula.

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) merupakan mandat pengelolaan sistem irigasi nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Dalam hal pengelolaan infrastruktur irigasi secara partisipatif pada jaringan irigasi tersier, secara teknis dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dimana pembinaan terhadap kelembagaan petani tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab dari instansi pemerintah yang menangani pertanian. Hal ini sejalan dengan mandat kementerian pertanian dalam pengelolaan irigasi tingkat usaha tani yang tertuang dalam PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya dijabarkan dalam Permentan 79/2012 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2021).

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) merupakan kelembagaan pengelola irigasi yang wajib dibentuk oleh petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa. Dalam pembentukan P3A ini, kelembagaan petani lokal yang sudah ada perlu dijadikan basis pengembangan P3A. P3A tersebut dapat membentuk Gabungan P3A (GP3A) pada suatu daerah layanan/blok sekunder atau beberapa blok sekunder. Sehingga GP3A merupakan gabungan beberapa P3A yang ada pada suatu daerah layanan sekunder atau lebih. GP3A tersebut dapat

membentuk suatu Induk P3A (IP3A) pada suatu daerah irigasi. Sehingga IP3A adalah suatu asosiasi dari beberapa GP3A yang ada pada satu daerah irigasi atau yang tergabung pada suatu intake pengambilan air.

P3A/GP3A/IP3A memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan irigasi di petak tersier dan berpartisipasi pada jaringan sekunder dan primer. Sehingga P3A/GP3A/IP3A harus memberikan kontribusi dalam pendanaan pengelolaan irigasi yang menjadi wewenangnya. Yang menjadi masalah, dari ratusan P3A yang ada di Kabupaten Gunungkidul hanya beberapa P3A yang kondisi manajemen dan kelembagaannya sudah cukup baik.

Oleh karena itu muncul pertanyaan besar, bagaimana strategi penguatan kelembagaan Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) , khususnya di wilayah Gunungkidul ?

Penelitian ini bermaksud merumuskan strategi pemberdayaan kelompok P3A di Gunungkidul dengan tujuan memperkuat ketahanan pangan masyarakat rentan di Gunungkidul.

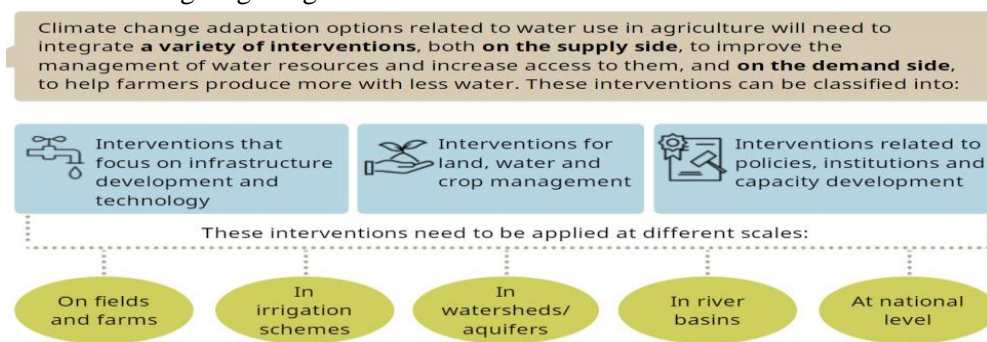
B. KAJIAN TEORI

Perubahan iklim berdampak serius terhadap ketersediaan air tawar. Berkurangnya ketersediaan air tawar berdampak luas terhadap produktivitas sektor pertanian, terutama pertanian yang mengandalkan irigasi teknis. Padahal di 50 tahun terakhir, lahan pertanian beririgasi teknis berlipat ganda dari 170 menjadi 333 juta hektar dan irigasi teknis akhirnya menjadi faktor kunci dalam intensifikasi produksi pertanian. Data FAO menyebutkan irigasi mampu menghasilkan output lebih dari tiga kali lipat hasil panen untuk memasok permintaan pangan yang juga terus meningkat (FAO, 2020).

Begitu pentingnya pilar manajemen air ini, maka agenda 2030 *Sustainable Development Goals* menempatkan secara khusus *SDGs goal 6 Clear water and sanitation* untuk menuju manajemen pengairan yang berkelanjutan. Kenaikan substansial efisiensi penggunaan air dalam segala sektor serta data yang ada telah menunjukkan berapa perubahan iklim menimbulkan ancaman kelangkaan dan krisis air, menempatkan *SDGs 6* ini berkorelasi langsung dengan *SDGs 2 Food*

and *Nutrition Security*, (UNDP Indonesia, 2016)

Menghadapi berbagai tantangan tersebut organisasi pertanian dunia mengeluarkan sarana adaptasi yang diperlukan seperti respon terhadap perubahan ketersediaan air di segala lini. Bentuk intervensi yang dirumuskan oleh FAO (Food and Agriculture Organization of The United Nations, 2020), tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar: Skema intervensi irigasi dalam level pemerintahan

Dalam konteks regional kewilayahan, Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Badan Pusat Statistik mencatat pada Februari 2017 penduduk Indonesia yang bekerja dan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian sekitar 31,86% (39,68 juta orang) dari total penduduk bekerja penduduk di Indonesia (BPS, 2017). Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mampu mensejahterakan petani dan mengembangkan pembangunan pertanian di Indonesia. Pertanian merupakan salah satu usaha yang sangat menguntungkan dan dapat dilakukan dengan efisien.

Irigasi berasal dari istilah *irrigate* dalam bahasa Belanda atau *irrigation* dalam bahasa Inggris. Irigasi dapat diartikan

sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk mendatangkan air dari sumbernya guna keperluan pertanian, mengalirkan dan membagikan air secara teratur dan setelah digunakan dapat pula dibuang kembali. (Memed, 2002) Air irigasi tidak akan memberikan manfaat yang optimal pada petani apabila tidak dikelola dengan baik dan benar (Asnawi, 2012) menyatakan bahwa salah satu sarana yang menunjang terlaksananya pembangunan di sektor pertanian adalah pengadaan irigasi, dengan maksud untuk meningkatkan produksi pangan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air irigasi, meningkatkan intensitas tanam, meningkatkan dan memberdayakan masyarakat desa dalam pembangunan jaringan irigasi pedesaan.

Dalam meningkatkan pengelolaan sistem irigasi teknis secara mandiri, memiliki daya serta berhasil guna maka pemerintah melalui Kepmendagri No 50/2001 (Kementrian Dalam Negeri , 2021) dan PP No 20 Tahun 2006, mengupayakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) sebagai instrumen untuk mewadahi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.

Petani Pemakai Air (P3A) sendiri didefinisikan sebagai semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi, dan pemakai air irigasi lainnya.

Secara teknis, jaringan irigasi sendiri terdiri dari beberapa jenis, yakni saluran primer, sekunder, tersier dan kwarter (Hutasuhut, 2011) Jenis saluran paling hilir inilah yang dikelola dn menjadi tanggungjawab partisipatif P3A.

Dalam manajemen irigasi, partisipasi petani pemakai air dalam pengelolaan irigasi begitu penting. Meskipun demikian, menumbuhkan partisipasi masyarakat petani juga bukan hal yang mudah. Sumaryanto dalam Ramdani, (Rulyana Ramdani, 2018), Pramulimenyebutkan, umumnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi petani dalam pemeliharaan saluran irigasi. Faktor faktor tersebut adalah umur (usia), tingkat pendidikan, luas lahan, jarak sarana irigasi dengan lahan. Anisa dan Irwan Noer dalam Yenifa dkk (Fira Yenifa, 2014) menyatkan beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah faktor sosial ekonomi, dimana meliputi antara lain adalah tingkat pendidikan dan pendapatan

masyarakat, kemudian faktor politik serta pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan yang terakhir faktor fisik, individu dan lingkungan.

Saat ini, kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan sistem irigasi telah ditetapkan dalam 2 (dua) landasan hukum yakni pada UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang irigasi. Dalam kedua landasan hukum yang telah dikeluarkan pemerintah itu, ditekankan bahwa dalam pengelolaan air irigasi pada irigasi tersier telah menjadi hak serta tanggung jawab dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk mengelolanya.

Perkumpulan petani pemakai air (P3A) adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air itu sendiri secara demokratis. (Theodora M. Katiandagho, 2015). Pemerintah mendorong terwujudnya kelembagaan Petani Pemakai Air (P3A) ini untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai pengelola air dan untuk memelihara saluran irigasi lokal yang dibangun oleh pihak pemerintah (Rachman, 2009)

Tugas pokok P3A dapat dijelaskan lebih lanjut secara terperinci menjadi sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan-perbaikan jaringan pengairan tersier dan pedesaan.
- b. Membuat peraturan dan ketentuan pembagian air pengairan serta pengamanan jaringan- jaringan pengairan
- c. Mengatasi dan menyelesaikan konflik air di tingkat petani
- d. Mengumpulkan dan mengurus iuran pembiayaan bagi

kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan dan jaringan pengairan

- e. Sebagai wadah partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi.

Untuk mendukung tanggungjawab P3A tersebut, maka diperlukan kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan kemampuan non teknis berupa kemampuan mengelola organisasi agar menjadi organisasi yang sehat dan sustainabel.

Namun dewasa ini, permasalahan yang paling utama dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi saat ini adalah masalah kelembagaan dan pembiayaan; sehingga dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi dari sisi kelembagaan perlu adanya penguatan kelembagaan dalam pengelolaan irigasi (Emil Sofyan, 2021)

Dalam proses pembentukannya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) merupakan kelembagaan yang dibentuk oleh petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa. Jika telah ada kelembagaan petani lokal yang sudah ada perlu dijadikan basis pengembangan P3A. Jika diperlukan P3A yang ada pada sebuah daerah irigasi dapat membentuk Gabungan P3A (GP3A) dan Induk P3A (IP3A) untuk mengatasi persoalan persoalan lintas perkumpulan yang muncul.

Secara umum upaya pemberdayaan kelembagaan P3A adalah meningkatkan memandirikan lembaga/organisasi tersebut dalam perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengorganisasian dan pengawasan serta meningkatkan kemampuan dalam bidang teknis pengelolaan irigasi. Peningkatan kapasitas kelembagaan P3A menurut Ditjen Bina Bangda (2007) meliputi peningkatan kapasitas P3A dan pemberdayaan petani

tingkat usaha tani dan jaminan keberlanjutan ketersediaan air irigasi, serta keberlanjutan dan fungsi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pembinaan P3A secara teknis sudah diatur dalam Permenpan no 79 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan P3A (Kementrian Pertanian, 2013). Dalam peraturan menteri tersebut di atur tata cara pembinaan beserta tahapannya. Menurut Permenpan tersebut pembinaan P3A meliputi aspek manajemen, organisasi dan kemampuan teknis dalam pengelolaan irigasi.

Ada beberapa penelitian terdahulu dalam topik pembinaan kelompok P3A yang dilakukan. Misalnya penelitian Aswarini (2016), yang berjudul Tingkat Partisipasi Petani Dalam Pemeliharaan Saluran Irigasi. Hasil dari penelitian Aswarini menyebutkan tingkat partisipasi petani dalam kegiatan perbaikan saluran irigasi adalah 56,66%, kegiatan pembersihan saluran irigasi adalah 70%, kegiatan menghadiri rapat rutin adalah 80%, kegiatan gotong royong adalah sekitar 76,66% dan partisipasi dalam kegiatan membayar iuran air pemeliharaan irigasi adalah 80%.

Penelitian Raintan Mariani Sinaga (2018), yang berjudul Partisipasi Organisasi P3A Dalam Pemeliharaan Dan Pengelolaan Irigasi Di Kabupaten Simalungun menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi petani anggota dalam organisasi P3A adalah sedang. Sementara itu tingkat partisipasi petani pengurus dalam organisasi P3A adalah tinggi. Beberapa masalah yang muncul dalam organisasi P3A dalam memelihara dan mengelola jaringan irigasi adalah kurangnya partisipasi anggota dalam hal pembayaran iuran, sistem pembukuan

yang tidak transparan, dan rendahnya rasa memiliki terhadap jaringan irigasi.

Armia dkk. (NU Armia, 2020) dalam penelitiannya berjudul Persepsi Petani Anggota P3A Terhadap Pengelolaan Irigasi Usahatani Padi Sawah Di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, menghasilkan kesimpulan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi petani anggota P3A terhadap pengelolaan irigasi usahatani padi sawah adalah pendidikan formal, motivasi, kebutuhan, lama berusaha, pemahaman terhadap P3A, lingkungan sosial, dukungan dinas terkait, dan luas lahan. Sedangkan faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan persepsi petani anggota P3A terhadap pengelolaan irigasi usahatani padi sawah adalah usia dan jumlah tanggungan keluarga.

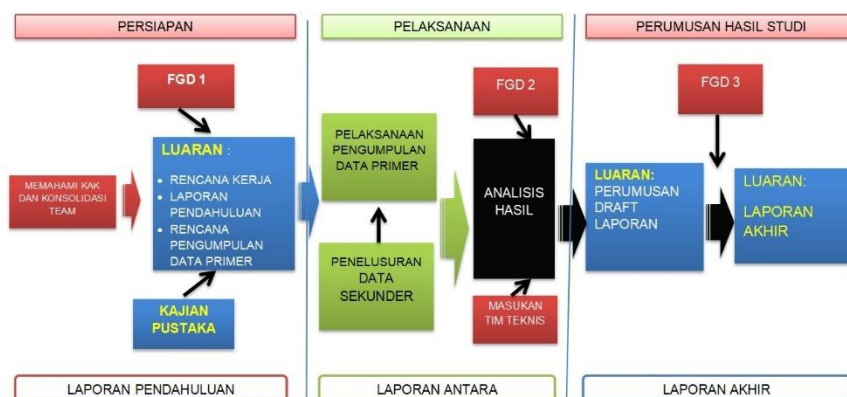
C. METODE PENELITIAN

Secara garis besar penelitian ini berupa penelitian deskriptif, yaitu satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai

setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Untuk itu maka akan digali berbagai data kualitatif maupun kuantitatif yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud di sini adalah data yang diperoleh langsung dari obyek kajian ini, yakni Kelompok P3A. Data sekunder adalah data tentang obyek penelitian yang diperoleh melalui pihak lain yang dianggap memiliki pengetahuan yang luas atas obyek yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari para pemangku kepentingan pengelolaan irigasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi lapangan.

Untuk menghasilkan luaran penelitian, dirancang sebuah pendekatan yang dapat di jelaskan dalam diagram berikut:



Gambar: Bagan Langkah Kerja

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten yang ada di wilayah tenggara DIY. Beribukota di Wonosari,

luas wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah 1.485,36 km² atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis Kabupaten

Gunungkidul berada pada 7⁰46' LS-8⁰09' LS dan 110⁰50' BT. Sebelah barat wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman, sebelah utara Kabupaten Klaten dan Sukoharjo (Jateng), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia (BPS Kabupaten Gunungkidul, 2019)

Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2011 berjumlah 677.998 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 327.841 jiwa dan perempuan sebanyak 350.157 jiwa. Dengan luas wilayah 148.536 Ha yang didiami 677.998 jiwa maka rata-rata kepadatan penduduk Gunungkidul adalah sebesar 456 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,38% pertahun. (BPS Kabupaten Gunungkidul, 2019)

Kabupaten Gunungkidul termasuk daerah beriklim tropis, dengan topografi wilayah yang didominasi dengan daerah kawasan perbukitan karst. Wilayah ini memiliki banyak terdapat goa-goa alam dan juga sungai bawah tanah yang mengalir. Dengan kondisi tersebut menyebabkan kondisi lahan di kawasan selatan kurang subur yang berakibat budidaya pertanian di kawasan memiliki banyak tantangan. Curah hujan tergolong cukup tinggi, namun wilayahnya tergolong tidak pandai menyimpan air hujan.

Secara topografis Kabupaten Gunungkidul memiliki dua daerah aliran sungai (DAS) permukaan yaitu DAS Opak-Oyo dan DAS Dengkeng. Masing-masing DAS itu terdiri dari beberapa Sub DAS yang dimanfaatkan untuk mengalir area pertanian. Yang menarik Gunungkidul juga memiliki DAS bawah permukaan yaitu DAS Bribin. Selain DAS, Gunungkidul juga memiliki banyak telaga untuk

menampung air hujan dan ratusan sumur pompa yang dibuat untuk keperluan pertanian dan peternakan

Air permukaan (sungai dan mata air) banyak dijumpai di Gunungkidul wilayah utara didaerah kecamatan Karangmojo dan Ponjong. Air permukaan ini dimanfaatkan untuk keperluan pertanian beras dan peternakan. Di wilayah tengah kabupaten ini memiliki beberapa tempat yang mempunyai air tanah yang cukup dangkal dan dimanfaatkan untuk sumur lading.

Dalam situasi geografis, hidrologis dan topografis penuh tantangan itu, masyarakat Gunungkidul memanfaatkan lahannya untuk berbagai keperluan, diantaranya hutan rakyat yang di tahun 2018 memiliki luas 44.110,87 ha dan kawasan hutan negara 13.221,5 ha. Luas lahan potensial kritis yang perlu ditangani seluas 28.928 ha. Lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan beririgasi seluas kurang lebih 7.86 ha meliputi sawah beririgasi teknis di Karangmojo dan Ponjong, serta sawah irigasi nonteknis di hampir semua kecamatan.

Wilayah pertanian yang didukung infrastruktur pengairan Gunungkidul tercatat sebagai berikut: pengairan teknis 130 Ha, pengairan semi teknis 1.118 Ha, pengairan sederhana 1047 Ha, pengairan tadah hujan 5.412 Ha dan pengairan lainnya 60 Ha. Kemampuan pengadaan saluran irigasi pemerintah diakui banyak terkendala oleh keterbatasan dana yang dimiliki.

Dalam perspektif manajemen irigasi, pada tahun 2016 tercatat Gunungkidul memiliki 240 Daerah Irigasi (DI) terdiri dari Daerah Irigasi Permukaan (182 lokasi), Daerah Irigasi Air Tanah/sumur pompa : (55 lokasi), Daerah Irigasi Pompa Air (3 lokasi) (Bappeda Kab. Gunungkidul, 2020)

Dalam situasi seperti itu, P3A di Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi dan tugas serta tujuan menangani pengadaan air irigasi, distribusi dan pengelolaan aringan tersier. Petani yang tergabung dalam P3A berasal dari berbagai kalangan, baik dari usaha pertanian, perikanan sampai peternakan. P3A ini juga sebagai suatu lembaga yang mengatur dan pengelola jaringan irigasi agar setiap petani yang memakai air ikut berpartisipasi dalam pengelolaan air irigasi sesuai dengan kemampuannya serta untuk meningkatkan kemampuan memperbaiki kinerja pengelolaan dan lembaga sumber daya air.

1. Kelembagan P3A Gunungkidul

Kondisi kelembagaan P3A yang di temui di lapangan menunjukkan variasi yang cukup besar; baik dilihat dari kondisi organisasinya, manajemen, sustainabilitasnya hingga kemampuan teknis yang mereka miliki. Untuk kepentingan perumusan strategi pengembangan data kelembagaan ini kelompok, data kelembagaan akan dituangkan dalam tiga varian dari kelompok P3A, dari yang paling lemah (mula), menengah (madya) hingga maju (utama)

Kondisi Kelembagaan P3a Dalam Tipologi Kelembagaannya

Aspek	Indikator	TIPOLOGI P3A		
		MULA	MADYA	UTAMA
Organsasi	Status Registrasi	Kelompok Belum teregistrasi simluhtan	Persiapan registrasi Simluhtan	Kelompok sudah teregistrasi
	Status Badan Hukum	Belum berbadan hukum	dalam proses pengurusan	Kelompok telah berbadan hukum
	AD-ART	AD-ART belum menjadi acuan kerja organisasi	Sebagian kegiatan sudah mengacu pada AD ART	Sebagian besar kegiatan kelompok mengacu AD ART
	Struktur Organisasi	struktur kepengurusan tapi tidak berfungsi	Memiliki struktur kepengurusan, sebagian tidak berfungsi secara optimal	Memiliki struktur lengkap dan berfungsi penuh
	Sistem Suksesi kepengurusan	Pengurus ditentukan pihak luar/belum pernah terjadi suksesi kepemimpinan	Pemilihan dan pergantian pengurus ditentukan dengan musyawarah	Pemilihan dan pergantian pengurus mengacu pada AD-ART
	Daftar anggota	Tidak memiliki	Daftar tidak <i>up to date</i>	Daftar anggota <i>up to date</i>

	Jumlah anggota aktif	< 30%	30 – 70 %	>70 %
Manajemen	Melaksanakan pertemuan rutin	Insidentil	Pertemuan kurang teratur	Pertemuan rutin berjalan teratur
	Memiliki buku adm. lengkap	Tidak memiliki	Memiliki beberapa buku administrasi	Buku administrasi lengkap
	Rencana Kerja	Tidak memiliki rencana kerja	Memiliki rencana kerja namun tidak dijalankan dengan konsisten	Memiliki rencana kerja yang dijalankan dengan konsisten
	Pelaksanaan dan Evaluasi Program	Tidak memiliki	Evaluasi program kurang terstruktur	Punya mekanisme mengevaluasi
Sustainabilitas	Memiliki sistem sangsi dan kontrol	Tidak memiliki	Sangsi ditentukan melalui rapat khusus	Memiliki sistem sangsi dan dilaksanakan
	Sumber Pendanaan	Pendanaan dicari secara insidental	Ada kesepakatan tentang iuran, namun tidak berjalan teratur	Ada iuran/tarif layanan yang disepakati dan dijalankan
	Memiliki Uang Kas	Tidak memiliki uang Kas	Memiliki uang kas, namun tidak signifikan < Rp.5 juta	Memiliki Uang Kas >Rp. 5Juta
	Memiliki networking	Tidak memiliki	Jejaring melekat pada pengurus	Kelompok Memiiki jejaring yang efektif
	Memiliki aset kelompok	Tidak memiliki aset	Memiliki aset, namun produktivitasnya rendah	Memiliki aset produktif
	Usaha ekonomi lain	Tidak punya	Sedang dirintis	Memiliki usaha kelompok produktif
Teknis	Alokasi dana untuk O & P	80-100% dana yang dimiliki untuk kegiatan O&P	50-80 % dana yang dimiliki untuk kegiatan O&P	<50 % dana untuk kegiatan O&P,

Kemampuan O&P Jaringan	Rendah	Sedang	Tinggi
Memiliki jadwal operasi jaringan	punya namun tidak efektif	Sebagian operasi jaringan sesuai jadwal	Sebagian besar operasi jaringan sesuai rencana/jadwal
Memiliki mekanisme distribusi air	Mekanisme kurang ditati	Sebagian besar operasi sesuai mekanisme	mekanisme distribusi air dilaksanakan secara konsisten
Memiliki mekanisme penyelesaian konflik	Konflik diatasi pihak luar/pemerintah	Konflik diselesaikan dengan musyawarah	Konflik diselesaikan melalui mekanisme yang sepakati
Memiliki tata/pola tanam dan dilaksanakannya	Kelompok tidak mampu mengatur tata/pola tanam anggotanya	Sebagian anggota tidak mentaati pola/tata tanam	Sebagian besar anggota mematuhi tata/pola tanam
Kemampuan mempertahankan luas tanam pada masa MT2	Kelompok tidak mampu mempertahankan luas tanam lahan pada masa MT2	Luas tanam pada MT2 sedikit menyusut dan berkurang produktivitasnya	Kelompok mampu mempertahankan luas tanam pada masa MT2
Kemampuan Kelompok menyesuaikan dengan Perubahan Iklim	Pada masa MT2 dan MT3 terjadi penurunan produksi yang signifikan	sebagian anggota mampu mempertahankan produktivitas MT2 dan MT3	Pada masa MT2 an MT3 produktivitas terjaga dengan mengubah jenis yang ditanam

Sumber: hasil survei dianalisis

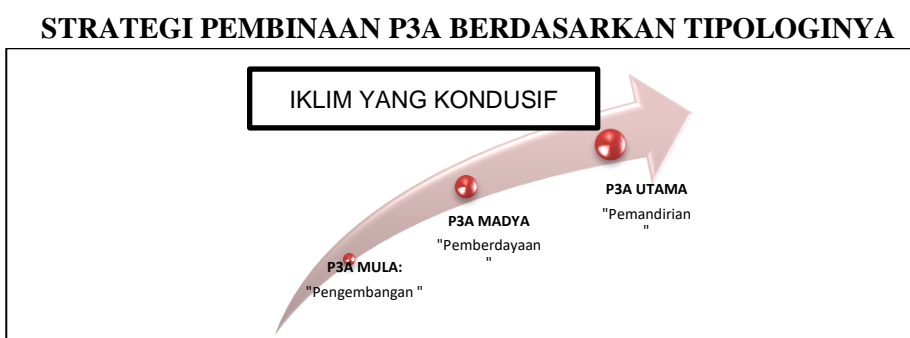
Terlihat ada tiga tipe P3A dengan karakteristik organisasi, manajemen, kemampuan memberi layanan secara teratur (sustainability) dan kemampuan teknis yang berbeda. P3A tipe *Mula* adalah kelompok yang lemah secara organisasi, dan manajemen, kemampuan bertahan amat rendah dan belum memiliki

kemampuan teknis pelayanan yang memadai. Tipe *Madya* adalah P3A yang kondisi organisasi dan manajemennya sudah mulai tumbuh, namun belum optimal, memiliki peluang bertahan yang cukup baik serta mulai memiliki kemampuan teknis pengelolaan jaringan irigasi dengan cukup baik. Sedangkan Tipe *Utama* adalah

P3A dengan organisasi dan manajemen sudah maju, memiliki sustainabilitas yang baik dalam memberi layanan serta memiliki kemampuan teknis operasi jaringan irigasi amat baik.

2. Pola Strategi Pembinaan Kelembagaan P3A

Ke depan kondisi P3A tipe Utama ini yang akan dijadikan model pembinaan, karena P3A tipe utama sudah mampu menjadi mitra pemerintah dalam pengelolaan irigasi pertanian, sehingga pola pembinaan P3A sebaiknya mengikuti alur pikir berikut ini :



Dari temuan di lapangan didapatkan fakta fakta yang cukup menarik terkait dengan strategi pembinaan P3A.

Pertama, kondisi eksisting P3A amat bervariasi antara satu dengan yang lain. Ada amat banyak P3A yang telah berdiri dan menyelenggarakan peran sebagai pengelola dan distribusi irigasi, namun kelembagaan organisasi dan manajemennya masih amat lemah, namun juga telah banyak bertebaran P3A yang telah maju, memiliki kemampuan teknis bagus, dengan organisasi dan manajemen yang sehat. Diantara dua tipe itu ada banyak berkembang P3A dengan kondisi yang beraneka ragam. Pengelompokan P3A kedalam tipologi tertentu amat strategis untuk merumuskan pola pembinaan yang dapat dikelola secara lebih baik dan masif.

Kedua, P3A tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang plural, dimana ada dinas sektoral (PU, Pertanian dan pemerintah lokal) yang hadir mempengaruhi kehidupan mereka, bahkan mereka sering bersinggungan dengan level

pemerintahan yang berbeda (Kabupaten, provinsi, bahkan unit unit kepanjangan Pemerintah Pusat seperti Balai Besar Sungai), sehingga pembinaan P3A sering tumpang tindih, kurang kordinatif dan tidak sinergis. Oleh karena itu sinergi antar instansi pembina ini perlu dilakukan dalam kerangka pembinaan P3A yang sinergis.

Ketiga, terdapat potensi sumberdaya yang sesungguhnya dapat menunjang kinerja P3A dalam pengembangan jaringan irigasi tersier, namun terkendala prosedur keuangan. Potensi itu adalah Dana Desa yang setiap tahun diperoleh oleh Pemerintah Desa. Beberapa Kepala Desa yang ditemuimenyatakan komitmen yag tinggi untuk menyalurkan sebagian dana desa untuk keperluan pengembangan jaringan tersier, namun mereka belum memiliki prosedur yang di benarkan untuk menyalurkan bantuan itu. Anggapan bahwa infrastruktur irigasi, termasuk jaringan tersier adalah ada di bawah kewenangan Dinas Teknis (PU) menjadi *barrier* untuk menyalurkan niat itu.

Memahami fakta fakta di atas peneliti mencoba merancang skema pembinaan sebagaimana di jelaskan pada paparan di bawah ini.

1) Kondisi P3A Mula

Dilihat dari organisasinya sebagian besar belum teregistrasi ke dalam SIMLUHTAN sehingga belum menjadi target pembinaan Dinas Pertanian. Penyeabnya sebagian besar belum berbadan hukum, belum memiliki AD-ART atau sudah memiliki AD ART namun belum menjadi acuan pelaksanaan manajemen dan organisasi kelompok.

Struktur kepengurusan sudah terbentuk, namun sebagian besar pengurusnya belum berungsi secara normal.

Kelompok P3A MULA biasanya juga belum memiliki mekanisme pergantian kepengurusan yang teratur. Anggota kelompok belum terdaftar pasti dengan partisipasi anggota yang rendah. Manajme amat bergantung pada ketua kelompoknya.

Karena lemahnya Organisasi dan Manajemen kelompok MULA, maka keberlangsungan (sustainabilitas), kelompok juga menjadi masalah terbesar. P3A jenis ini belum memiliki sumber dan mekanisme pendanaan yang pasti, tidak memiliki jejaring dengan pihak luar.

Meskipun aspek organisasi dan manajemen kelompok MULA masih belum berkembang, namun rata rata kelompok P3A jenis ini sudah secara teratur melaksanakan fungsi operasional dan perawatan jaringan tersier. Mereka secara terbatas sudah mendistribusikan air ke seluruh anggota dengan cukup baik termasuk dalam mengatasi konflik air di tingkat anggota. Namun rata rata masih melakukannya secara tidak melembaga dan amat tergantung dari pengurus. Sebagian besar atau bahkan semua dana yang

dikumpulkan dari anggota habis dialokasikan untuk kepentingan teknis O&P sehingga belum dapat melaksanakan program program pertanian yang lain. Mereka secara sederhana juga telah menyepakati mekanisme distribusi air, namun kadangkala kurang ditaati. Kelompok P3A Mula juga belum mampu mengatur tata/pola tanam kelompoknya, apalagi jika ketersediaan air irigasi berlimpah.

2) Kondisi P3A Madya

Dibanding dengan kondisi P3A Mula, kelompok P3A Madya kondisinya sudah lebih baik. Terlihat dari 3 aspek yang diamati kondisi mereka adalah sebagai berikut: Kelompok P3A Madya rata rata sudah berdiri cukup lama dan melaksanakan tugas fungsinya dengan cukup baik, terutama dalam aspek teknis irigasi. Kelompok ini biasanya sedang mengupayakan registrasi kelompok pada SIMLUHTAN, memperbaiki AD-ART untuk mendapatkan Status Badan Hukum dari Kemenkumham. Kelompok ini sudah menyadari pentingnya registrasi, AD-ART dan pentingnya status badan hukum untuk meningkatkan kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan. AD-ART (atau sejenisnya) sudah mulai menjadi acuan kelompok untuk menyelenggarakan organisasi dan manajemen serta mengatasi masalah yang dihadapi. Struktur kepengurusan sudah terbentuk lengkap meskipun beberapa unit belum memiliki kinerja yang optimal. Peran figur ketua atau elit organisasi masih cukup mewarnai dinamika organisasi. Kelompok P3A Madya sudah memiliki pengalaman sukseki kepengurusan, meskipun prosesnya masih kurang demokratis dan berdasarkan permufakatan elit kelompok saja. Daftar anggota kelompok sudah tersedia namun tidak cukup mutakhir dan

anggota yang aktif dalam kegiatan kelompok mencapai 30-70 %.

Pertemuan rutin kelompok sudah disepakati namun belum dilaksanakan secara teratur. Demikian juga dengan rencana kerja. Sudah tersusun namun belum sepenuhnya menjadi acuan kegiatan kelompok. Evaluasi terhadap program kerja belum dilaksanakan secara serius, sehingga kinerja organisasi belum terukur secara obyektif. Kelompok Madya sudah mengadministasi kegiatannya dalam beberapa buku administrasi, namun belum lengkap.

Keberlangsungan layanan dan kegiatan kelompok sudah mulai membaik. Kelompok Madya sudah memiliki kesepakatan tentang iuran dan rencana kerja, namun belum tergali secara optimal. Jejaring dengan dunia luar untuk mendapatkan bantuan teknis sudah mulai terbentuk, namun masih bergantung pada akses yang dimiliki beberapa elit kelompok. Aset yang berpotensi membantu pembiayaan kelompok barangkali sudah dimiliki, namun efektivitasnya masih rendah. Demikian juga dengan usaha lain (sampingan).

Aspek Teknis Irigasi dan Pertanian Kinerja kelompok Madya sudah cukup baik, mekanisme distribusi air sudah dimiliki dan dipakai secara konsisten, namun kelompok belum dapat memberi "sanksi" pada anggota yang melanggar. Konflik yang terjadi sebagian besar diselesaikan secara musyawarah.

Dalam hal operasi dan pemeliharaan jaminan sebagian sudah dikerjakan sesuai rencana kerja. Namun begitu penegakan terhadap pola tanam yang disepakati masih sering dilanggar anggotanya.

3) Kondisi P3A Utama

Dari penelusuran pustaka dan dikonfirmasi hasil survai, kondisi eksisting

P3A yang lain maju adalah kelompok yang penyusun namakan kelompok P3A Utama. Dibanding dengan P3A Mula Dan Madya, kelompok P3A ini kondisinya paling baik. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui aspek kelembagaan, sustainabilitas dan kemampuan teknis yang dimiliki.

Organisasi dan manajemen P3A Utama kondisinya sudah cukup baik. Kelompok ini sudah tergistrasi dalam SIMLUHTAN, berstatus badan hukum dan memiliki AD- ART yang secara konsisten menjadi acuan penyelenggaraan organisasi. P3A Utama sudah memiliki kepengurusan yang lengkap, berfungsi optimal dan disusun melalui mekanisme pergantian kepengurusan yang sudah disepakati (dalam AD- ART). Daftar anggota tersedia lengkap dan informasinya selalu di update secara periodik. Anggota aktif P3A Utama mencapai lebih dari 70% dan berpartisipasi aktif dalam rapat rapat kelompok dan pelaksanaan program kelompok.

Pertemuan anggota sudah dilaksanakan secara rutin untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi serta mengevaluasi pelaksanaan program kerja. P3A juga sudah memiliki buku administrasi yang lengkap untuk mencatat berbagai dinamika kegiatan organisasi. Rencana kerja sudah dijadikan acuan bagi pengurus untuk melaksanakan kegiatan O dan P. Pelaksanaan program dievaluasi secara teratur pada akhir tahun. Kelompok juga sudah memiliki sistem sanksi yang dipakai untuk mendisiplinkan anggota.

Kelompok telah mampu menghimpun kekayaan kelompok melalui iuran rutin, usaha sampingan dan donasi dari pihak luar. Jejaring dengan dunia luar dimiliki kelompok untuk mendapatkan bantuan teknis dari pihak luar. Beberapa kelompok memiliki usaha sampingan

(pariwisata, kuliner) untuk menunjang beban pembiayaan. Oleh karena itu kelompok biasanya telah memiliki akumulasi uang kas yang nilainya cukup signifikan. Hasil survai menunjukkan kelompok yang telah maju memiliki uang kas antara > 5 juta hingga 27 juta rupiah.

Di bidang kemampuan teknis kelompok ini sudah mulai mampu mengembangkan kegiatan penunjang untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok dan produktivitas hasil panen. P3A Utama sudah memiliki mekanisme distribusi dan penjadwalan yang jelas dan ditaati oleh pengurus dan anggota P3A. Konflik air yang timbul sudah ditangani secara melembaga dan adil. Sebagian besar anggota mematuhi pola tanam yang ditetapkan kelompok.

Karena efektivitas kinerja O&P yang tinggi, maka kelompok berhasil mempertahankan luas lahan, terutama pada masa masa sulit air (MT2 dan MT3) . Anggota kelompok sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat menyesuaikan budidaya pertanian dengan iklim dan cuaca.

E. KESIMPULAN

- a. Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kelompok Petani Pengguna Air bervariasi di lihat dari kondisi manajemen organisasi dan kinerja yang dimiliki. Jika di urutkan mereka terbagi menjadi kelompok “mula” yakni P3A paling sederhana kondisinya, “Madya” dan “Utama” yaitu kelompok yang sudah memiliki manajemen organisasi paling baik dan kemampuan teknis paling baik.
- b. Karena sifatnya yang berjenjang, maka pembinaan P3A dapat diarahkan ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya dari mula ke madya, dan dari madya ke utama. Dengan materi materi sesuai kriteria kelompok P3A yang dituju.

Secara detail pola pembinaan kelembagaan Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) secara sederhana, adalah sebagai berikut:

Pola Pembinaan Kelembagaan Petani Pemakai Air (P3A)

	Arah Pembinaan	Bentuk Program Pembinaan	Metode	Leading Sector
A	PENGEMBANGAN P3A MULA			
1	Penguatan Kelembagaan P3A agar dapat berkembang memiliki kelembagaan yang kuat	Mendorong Kelompok untuk teregistrasi dalam Simluhtan	Workshop dan fasilitasi	Penyuluh, Dinas Pertanian Kab.
		Membantu P3A berbadan hukum	Workshop dan fasilitasi	Penyuluh, Dinas Pertanian
		Membantu Keompok menyusun AD ART yang baik	Workshop, pendampingan	Penyuluh
		Mendorong Kelompok memiliki Struktur Kepengurusan yang lengkap dan berfungsi	Workshop	Dinas Pertanian Kab, Penyuluh

	Arah Pembinaan	Bentuk Program Pembinaan	Metode	Leading Sector
		Memfasilitasi Kelompok melakukan Rekrutmen Kepengurusan secara demokratis	Fasilitasi	Dinas Pertanian Kab.
		Membantu kelompok memiliki Daftar Anggota yang valid	Pendampingan, Fasilitasi	Penyuluh, Dinas Pertanian
2	Menumbuhkan kembangkan Manajemen Kelompok	Membantu kelompok menyepakati pertemuan rutin anggota	Pendampingan	Penyuluh
		Mendorong Kelompok memiliki buku administrasi yang lengkap berfungsi	Pendampingan, fasilitasi	Dinas Pertanian, penyuluh
		Mendorong Kelompok menyusun Rencana Kerja Tahunan dan sistem evaluasinya	Penyuluhan	Penyuluh
		Menginisiasi kesepakatan kelompok dalam merumuskan sistem sangsi	Pendampingan	Penyuluh, Dinas Pertanian
3	Menumbuhkan Sustainabilitas Kelompok	Mendorong kelompok menyepakati penggalangan dana O&P secara rutin (Iuran anggota)	Penyuluhan dan pendampingan	Penyuluh, Dinas PU
		Mendorong Kelompok menghimpun Uang Kas	Penyuluhan, Partisipasi masyarakat	Penyuluh, Dinas PU
		Membuka peluang pengurus memiliki jiwa kewirausahaan	Studi banding / magang	Dinas PU, Dinas Pertanian Kab.
		Mendorong kelompok membangun jejaring dengan pihak luar	Studi banding, fasilitasi	Dinas PU
4	Kemampuan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan	Meningkatkan Kapasitas pengelolaan O &P	Magang/studi banding	Dinas PU Kab.
		Mendorong terbentuk/disepakatinya Jadwal dan mekanisme distribusi air	Pendampingan, penggalangan partisipasi	Dinas PU, penyuluh, Pengurus P3A
		Mendorong terbentuknya mekanisme penyelesaian konflik air	Studi banding, partisipasi	Dinas PU, penyuluh, pengurus P3A
		Mendorong dipatuhinya pola tanam secara partisipatif	Pelatihan, penggalangan partisipasi	Dinas Pertanian Kab.
B PEMBERDAYAAN P3A MADYA				
1	Pemberdayaan organisasi dan Manajemen P3A menjadi	Melaksanakan proses pengurusan status hukum P3A	Pendampingan, Fasilitasi	Penyuluh, Dinas Pertanian
		Sosialisasi AD-ART dan mendorong Pengurus maupun	Penyuluhan, pendampingan	Dinas Pertanian, Penyuluh

	Arah Pembinaan	Bentuk Program Pembinaan	Metode	Leading Sector
	Orgaisasi yang mantap, berbadan Hukum, teregistrasi dan menjalankan praktek manajemen yang sehat	anggota menggunakannya sebagai acuan kegiatan		
		Registrasi dalam SIMLUHTAN	Pendampingan	Dinas Pertanian, Penyuluh
		Melaksanakan ketentuan AD dan ART dalam Pergantian Pengurus	Pendampingan	Penyuluh
		Mengembangkan kapasitas manajemen pengurus P3A	Pelatihan	Dinas PU, Dinas Pertanian Kab.
		Melaksanakan pertemuan rutin secara teratur	Partisipasi	Pengurus
		Melakukan <i>update</i> daftar anggota secara rutin (pada saat pertemuan rutin kelompok)	Pendampingan	Pengurus, Penyuluh
		Melibatkan anggota (partisipasi) dalam berbagai kegiatan dan pengambilan keputusan (kepemimpinan demokratis)	Partisipasi	Pengurus P3A, penyuluh
		Menyusun rencana kerja secara partisipatif	<i>workshop</i> partisipasi	Dinas PU Kab, Penyuluh
		Melakukan pencatatan dan pelaporan aktivitas kelompok dalam buku administrasi	Pendampingan	Penyuluh
		Menyelenggarakan rapat tahunan (evaluasi program)	Pendampingan, fasilitasi	Penyuluh, Dinas PU Kab, Dinas Pertanian
		Menginisiasi sistem sangsi	Studi banding	Dinas Pertanian
2	Merintis kemandirian keuangan untuk menunjang Sustainabilitas kelompok P3A	Menghidupkan iuran rutin dan mengelolanya secara transparan dan akuntabel	Pendampingan dan Pelatihan	Dinas Pertanian
		Menghimpun uang kas melalui iuran, donasi, kerjasama	Partisipasi, studi banding	Dinas Pertanian, Dinas PU Kab
		Menngembangkan sumber pendanaan alternatif	Studi Banding,	Dinas Pertanian Prov-Kab
		Menginventarisir dan memelihara aset kelompok	Pendampingan	penyuluh
3	Memperkuat kapasitas Teknis Irigasi dan Perertanian	Mengembangkan kapasitas O&P kelompok	Studi banding	Dinas PU
		Mengalokasikan sebagian anggaran untuk upaya pengembangan non teknis irigasi (pertanian usaha produktif)	Pelatihan dan pendampingan	Dinas Pertanian
		Melaksanakan operasi jaringan sesuai jadwal dan rencana kerja	Pendampingan, partisipasi	Dinas PU, Penyuluh
		Melaksanakan distribusi air sesuai mekanisme dan jadwal yang disepakati	Pendampingan, partisipasi	Dinas PU, penyuluh

	Arah Pembinaan	Bentuk Program Pembinaan	Metode	Leading Sector	
		Menyelesaikan konflik dengan mengacu pada AD-ART dan musyawarah kelompok	Pendampingan, partisipasi	Penyuluh	
		Melakukan sosialisasi dan pentingnya mentaati pola tanam dan Tata Tanam kepada anggota	Pelatihan, partisipasi	Penyuluh	
		Pengembangan kapasitas anggota dalam mengantisipasi perubahan iklim (MT2 dan MT3)	Studi banding	Dinas Pertanian Prop.	
C PEMANDIRIAN P3A UTAMA					
1	Kelembagaan P3A memiliki organisasi yang mantap dengan mempraktekan fungsi manajemen sehat Sustainabilitas kelompok mantap dan mampu mengembangkan kewirausahaan	Memantapkan kelembagaan kelompok melalui lomba kelembagaan (organisasi dan manajemen)	Lomba / kompetisi	Dinas PU dan Dinas Pertanian	
		Memberi peran Kelompok untuk menjadi mentor bagi P3A mula (tempat magang, tempat studi banding)	Pendampingan, insentif	Dinas PU	
		Mengembangkan reward system untuk pengurus	Insentif, pendampingan	Penyuluh,	
		Mengembangkan mekanisme suksesi kepemimpinan yang lebih demokratis	fasilitasi	Dinas Pertanian	
		Membangun sistem informasi kelompok berbasis IT	Pelatihan, workshop	Dinas Pertanian Prop	
		Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi program kelompok		Pelatihan, pendampingan	Dinas Pertanian Prop
				Pendampingan	Penyuluh
			Menyelenggarakan hibah kewirausahaan untuk kelompok P3A Utama	Insentif, hibah	Dinas Pertanian Prop
			Mendorong berkembangnya unit usaha alternatif	Studi banding Dana Stimulan	Dinas Pertanian Prop
2		Kemampuan Teknis Irigasi dan Pertanian menjadi rujukan P3A Mula dan Madya	Menyelenggarakan Hibah Pengembangan Jaringan berbasis Proposal	Program Hibah Kompetitif	Dinas PU
	Lomba Inovasi pengelolaan Pertanian pada Musim Kering (MT2-MT3)		Lomba, studi banding	Dinas Pertanian Prop-Kab	
	Menjadi ajang Studi Banding dan Magang		Insentif	Dinas Pertanian	

Arah Pembinaan	Bentuk Program Pembinaan	Metode	Leading Sector
	Peningkatan Kemampuan Teknis O&P Irigasi berbasis Teknologi	Pelatihan, studi banding	Dinas PU Kab
	Menyusun Tata Tanam dan Rencana Distribusi Air Detail dan dilaksanakan secara Konsisten	Pendampingan	Dinas Pertanian Kab.
	Melaksanakan Pembangunan, Pemeliharaan dan Operasi Jaringan	Hibah kompetitif	Dinas PU Prop
	Membangun kemampuan komunikasi dan Mengembangkan Jejaring dengan Dunia Usaha, Pasardan Instansi Teknis	Pendampingan, fasilitasi	Dinas PU – Dinas Pertanian Prop-Kab

Tabel: Rancangan Pola Pembinaan Kelembagaan P3A

Melengkapi upaya pembinaan kelembagaan P3A sebagaimana di paparkan di atas, maka perlu juga menata dan menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan P3A. Beberapa upaya yang dapat diraih adalah:

1. Kordinasi antar sektor dan antar level (Pertanian, PU dan Pemerintah Desa)
2. Menyusun kebijakan pembinaan terintegrasi Lintas Sektor
3. Pemanfaatan Dana Desa untuk pengembangan dan pemeliharaan Jaringan
4. Memfasilitasi pebentukan jejaring antara P3A dengan Pasar/Dunia Usaha.
5. Delegasi kewenangan lebih besar untuk P3A UTAMA dalam pembangunan /pengembangan jaringan irigasi dan pembinaan terhadap P3A Mula dan Madya.
6. Alokasi anggaran berupa insentif untuk mendorong inovasi, prestasi dan kinerja P3A.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, R. (2012). Observation of Rainfall Effect on Vanilla Flowering. *Jurnal Agribisnis*.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2021, february 10). Retrieved from bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4760/pp-no-38-tahun-2007>
- Bappeda Kab. Gunungkidul . (2020, April). Retrieved from <https://data.gunungkidulkab.go.id/>: https://data.gunungkidulkab.go.id/min_MN/dataset/evaluasi-hasil-rkpd-triwulan-i-tahun-2020
- BPS. (2017). Statistik Indonesia 2017. Jakarta, Indonesia.
- BPS Kabupaten Gunungkidul. (2019). *Statistik Daerah Kaupaten Gunungkidul 2019*. Wonosari : BPS Kabupaten Gunungkidul.
- Emil Sofyan, K. a. (2021). *Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dana Alokasi Khusus Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Solok*. Padang: Universitas Bung Hatta.

- Fira Yenifa, I. I. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota P3a Dalam Pengelolaan Irigasi Pada Water Resources And Irrigation *Jurnal Riset Manajemen Bisnis dan Publik*.
- Food and Agriculture Organization of The United Nations. (2020). *Climate Change* . Roma, Italia.
- Hutasuhut, F. E. (2011). *Peranan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani di Daerah Irigasi Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang*. Medan : Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Kementrian Dalam Negeri . (2021, Januari 10). Retrieved from www.bphn.go.id:
<https://www.bphn.go.id/data/documents/16pmdagri010.pdf>
- Kementrian ESDM. (2020, Agustus 12). Retrieved from <https://jdih.esdm.go.id>:
<https://jdih.esdm.go.id/peraturan>U>
U No7 tahun 2004
- Kementrian Keuangan . (2021, Februari 10). Retrieved from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/20tahun2006pp.htm>:
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/20tahun2006pp.htm>
- Kementrian Pertanian. (2013). *Pedoman Teknis Pemberdayaan Kelembagaan* . Jakarta: Direktorat Pengelolaan Air Irigasi.
- Memed, E. M. (2002). *Desain Hidrolik Bendung Tetap untuk Irigasi Teknis*. Bandung: Bandung Alfabet.
- NU Armia, D. G. (2020). Persepsi Petani Anggota P3A Terhadap Pengelolaan Irigasi Usahatani Padi Sawah di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro. *Jurnal Ilmu Agribisnis*.
- Rachman, B. (2009). *Kebijakan Sistem Kelembagaan Pengelolaan Irigasi: Kasus Provinsi Banten. Analisis Kebijakan Pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1*.
- Rulyana Ramdani, A. T. (2018). Tingkat Partisipasi anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam Pengelolaan Saluran Irigasi Bantimurung, Kab Maros. *Jurnal Sosial Ekonomi pertanian* , 1-10.
- Theodora M. Katiandagho, W. M. (2015). Perilaku Petani Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3a) Rukun Santoso di Desa Konarom Barat Kecamatan Dumoga Tenggara. *Agri-Sosio Ekonomi*.
- UNDP Indonesia. (2016). *Sustainable Development Goals*. Jakarta, Jakarta Special Province, Indonesia.